

Submitted: 22 November 2021	Accepted: 1 April 2022	Published: 6 September 2022
-----------------------------	------------------------	-----------------------------

Pengaruh Pemahaman Rohaniwan Gereja tentang Model Pemerintahan Gereja terhadap Ketertiban Gereja

Jairus Hasugian*; S. Pantja Djati; Eddy Simanjuntak

Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Theologia Ekumene, Jakarta

*y_hsgn05@yahoo.co.id**

Abstract

Organizations and positions in the Church exist for the purpose of bringing about order. However, there are often tensions and frictions between clergy and laity caused by an understanding of the government of the Church. The purpose of this study was to analyze the level of understanding of the Church's clergy about the model of Church government and its influence on Church order. The method used is descriptive exploratory, with a quantitative approach. The research variables consisted of the Sinodal Presbyterian government model (X1), Laikal (X2), Elders (X3), and order (Y). The object of research is the clergy of the Church of Isa Almasih (GIA), with a total sample of 193 people. The results showed that the level of understanding of the GIA clergy on the Sinodal Presbyterian model of government was very low compared to the understanding of the Laikal or Elder government model. Thus, it can be concluded that the tensions and frictions that occur are due to a lack of understanding of the model of government adopted by the Church Synod.

Keywords: Church Government; Sinodal Presbyterian; Laikal; Elders; clergy

Abstrak

Organisasi dan jabatan dalam Gereja ada dengan tujuan agar terwujud ketertiban. Namun, sering kali justru terjadi ketegangan dan gesekan di antara rohaniwan dan kaum awam yang disebabkan oleh pemahaman tentang pemerintahan Gereja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pemahaman rohaniwan Gereja tentang model pemerintahan Gereja dan pengaruhnya terhadap ketertiban Gereja. Metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif, dengan pendekatan kuantitatif. Variabel penelitian terdiri atas model pemerintahan Presbiterial Sinodal (X1), Laikal (X2), Kepenatuaan (X3), dan ketertiban (Y). Obyek penelitian adalah para rohaniwan Gereja Isa Almasih (GIA), dengan jumlah sampel 193 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman rohaniwan GIA tentang model pemerintahan Presbiterial Sinodal sangat kurang dibandingkan dengan pemahaman terhadap model pemerintahan Laikal atau Kepenatuaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketegangan dan gesekan yang terjadi adalah oleh karena pemahaman yang kurang terhadap model pemerintahan yang dianut Sinode Gerejanya.

Kata Kunci: pemerintahan Gereja; Presbiterial Sinodal; Laikal; Kepenatuaan; rohaniwan

PENDAHULUAN

Gereja senantiasa menampakkan diri dalam bentuk organisasi tertentu.¹ Organisasi tersebut bertujuan: untuk melengkapi para anggotanya dengan seluruh perlengkapan senjata Allah (Ef. 6:11);² untuk menjaga ketertiban, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam rumah Tuhan (Tit. 1:3-5); dan untuk membentuk identitas masyarakat Kristen.³ Salah satu alat untuk memelihara kehidupan gereja yang teratur, tertib dan aman adalah disiplin gereja.⁴ Sebagai suatu organisasi, sudah barang tentu Gereja membutuhkan pejabat yang bertugas: pertama, untuk memikirkan dan mengorganisasikan pertumbuhan Gereja;⁵ kedua, untuk mengupayakan kestabilan dan kemajuan Gereja;⁶ ketiga, untuk menjaga keteraturan dan ketertiban di dalam Gereja, di mana Tata Gereja dapat menjadi hukum yang objektif untuk menjaga ketera-

turan dan ketertiban bergereja baik secara individu ataupun berjemaah.⁷

Sama seperti Gereja pada umumnya, Gereja Isa Almasih (GIA) juga merupakan suatu lembaga yang mempunyai organisasi dan pemerintahan. Bentuk pemerintahan GIA adalah jamak (majelis).⁸ Pendiri GIA, Pendeta Tan Hok Tjoan, menyatakan, “Sebuah Geredja tanpa Madjelis pilihan Djemaat belum dapat dikatakan satu Geredja jang mempunjai makna – kegere-djaan.”⁹ Pernyataan tersebut tentu saja tidak lazim, sebab GIA adalah gereja dengan corak Pentakostal. Tradisi Pentakostal adalah darah sekaligus ruh dari GIA.¹⁰ Maka ada yang mencirikan GIA itu sebagai “terlalu Protestan untuk digolongkan ke dalam Gereja Pentakostal dan terlalu Pentakostal untuk digolongkan ke dalam Gereja Protestan.”¹¹ Dalam hal pergaulan ekumenis, GIA juga hanya menjadi anggota dari persekutuan bercorak Protestan. Pada aras nasional,

¹ Donald Guthrie, *Teologia Perjanjian Baru*, Jilid 3 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993).

² Harun Hadiwijono, *Iman Kristen* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007).

³ Yusak Soleiman, “Tradisi Teologis Calvinis Di Indonesia - Sebuah Pendekatan Sejarah Sosial,” *Academia*, 2009.

⁴ Yonathan Mangolo and Osinus Sagala, “Disiplin Gereja,” *KINAA: Jurnal Teologi* 4, no. 2 (December 30, 2019): 51–64, <https://doi.org/10.0302/KINAA.V4I2.1031>.

⁵ Dina Esterina, “Gereja Sebagai Organisasi Yang Khas,” dinaesterinastories.blogspot.com, 2015.

⁶ Eka Darmaputera, “Kepemimpinan: Perspektif Alkitab,” in *Kepemimpinan Kristiani: Spiritualitas, Etika, Dan Teknik-Teknik Kepemimpinan Dalam Era Penuh Perubahan*, ed. Eka Darmaputera

(Jakarta: Unit Publikasi & Informasi Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, 2003), 1.

⁷ Tony Waworuntu, “Tatanan Untuk Ketertiban Hidup,” gpibgetsemani.blogspot.com (Balikpapan, n.d.).

⁸ Indrawan Eleas, *Gerakan Pentakosta Berkaitan Dengan Sejarah Dan Teologia Gereja Isa Almasih* (Semarang: GIA Pringgading, 2008), 269.

⁹ Tan Hok Tjoan, *Buku Peringatan Berdiri 10 Tahun Dari Geredja Isa Almasih (Sing Ling Kauw Hwee) Di Indonesia* (Semarang, 1956), 18.

¹⁰ Tedy Koliludin, “Semarang Ibu Kota Gereja Isa Almasih,” elsaonline.com, n.d.

¹¹ Hendarto Supatra, “Kajian Sinkronik 10 Tahun Gereja Isa Almasih Sebagaimana Tercermin Pada “Dokumen Peringatan 10 Tahun Geredja Isa Almasih”” (STT Abdiel, Ungaran, 2002), 2.

GIA hanya menjadi anggota Persekutan Gereja-gereja di Indonesia (PGI); pada aras regional, GIA hanya menjadi anggota dari *Christian Conference of Asia (CCA)*; dan pada aras internasional – walaupun belum menjadi anggota – GIA pernah menjadi peninjau (*observer*) pada Sidang Raya *World Council of Churches/WCC* di Busan, Korea Selatan, pada tahun 2013.

Walaupun berbentuk organisasi dan mempunyai model pemerintahan, namun GIA nampaknya belum sepenuhnya dapat mewujudkan ketertiban dalam dirinya. Seringkali muncul ketegangan-ketegangan, benturan-benturan dan gesekan-gesekan yang sulit untuk diselesaikan, khususnya antara Gembala dengan anggota Majelis.¹² Penyebabnya seringkali menyangkut kepemimpinan. Misalnya, siapa yang menjadi pemimpin di GIA, Majelis ataulah Gembala Jemaat? Jamak atau tunggal? Jika jamak, mengapa ada Gembala Jemaat? Jika tunggal, mengapa ada Majelis? Dalam buku *Tata Dasar GIA* disebutkan bahwa pemerintahan gerejawi pada tingkat GIA Jemaat Lokal dipimpin oleh Gembala Jemaat dibantu Majelis Jemaat.¹³ Namun dalam buku *Tata Tertib GIA* disebutkan, “Majelis Jemaat merupakan perwujudan pemerintahan ber-

sama dalam Jemaat sebagai pimpinan tertinggi GIA Jemaat Lokal.”¹⁴ Ada yang menyebut bahwa pemerintahan GIA itu adalah Presbiterial Sinodal,¹⁵ tetapi ada pula yang menyebut bahwa pemerintahan dalam GIA itu bersifat ganda/dualistik.¹⁶ Dalam *Tata Gereja* disebutkan pula bahwa Pendeta lain (non Gembala), Penatua dan Diaken, tugasnya adalah membantu Gembala Sidang. Akibat dari ketidakjelasan ini sering terjadi ketegangan-ketegangan, benturan-benturan dan gesekan-gesekan antara Gembala dengan anggota Majelis. Sebagai contoh, pada suatu rapat Majelis, Tan Hok Tjoan – pendiri dan Gembala Sidang pertama serta Ketua Sinode pertama Sing Ling Kaw Hwee/GIA – menyampaikan sikapnya berkaitan dengan acara sandiwara Natal yang ditampilkan di GIA Jemaat Pringgading pada tahun 1953. Dalam rapat itu Tan Hok Tjoan mengkaitkan antara sandiwara Natal dengan sakit ‘*Maagbloeding*’ yang dia derita selama tiga tahun berturut-turut, yang menyebabkan dia harus *opname* di Rumah Sakit sebanyak tiga kali, yaitu pertama 28 hari, kedua 21 hari, dan ketiga 44 hari. Menurut Tan Hok Tjoan, dirinya mendapat konfirmasi dari Tuhan bahwa penyakit tersebut disebabkan karena dia mengizinkan sandi-

¹² Eleas, *Gerakan Pentakosta Berkaitan Dengan Sejarah Dan Teologia Gereja Isa Almasih*, 172-173.

¹³ MPH Sinode GIA, *Tata Gereja Sinode Gereja Isa Almasih* (Semarang: MPH Sinode GIA, 2008).

¹⁴ GIA, 71.

¹⁵ Supatra, “Kajian Sinkronik 10 Tahun Gereja Isa Almasih Sebagaimana Tercermin Pada “Dokumen Peringatan 10 Tahun Geredja Isa Almasih”.”

¹⁶ Ronny Gunawan, “Benarkah Gereja Isa Almasih Menganut Sistem Organisasi Presbyterial Sinodal?” (Semarang, 2001).

wara dalam Gereja.¹⁷ Rapat memang memutuskan bahwa tidak akan ada lagi sandiwara Natal di gereja. Dan itu memang merupakan hasil musyawarah Majelis. Namun jika dicermati, pada waktu itu Pendeta Tan Hok Tjoan nampaknya menggunakan wewenangnya selaku Gembala Sidang, sehingga keputusan tersebut dapat dikatakan lebih didominasi oleh semacam “tekanan” dari wewenang yang dimiliki oleh seorang Gembala Sidang (tunggal) dibanding keputusan yang rasional oleh seluruh anggota Majelis (kolektif).

Kenapa muncul gesekan-gesekan, benturan-benturan dan ketegangan-ketegangan? Menurut Indrawan Eleas hal itu disebabkan karena pemahaman sistem pemerintahan Presbiterial Sinodal tidak didalami atau tanpa melalui riset yang mendalam terlebih dahulu.¹⁸ Sejak semula, walaupun bersifat jamak/kolektif, kepemimpinan GIA berbeda dengan kepemimpinan Gereja-gereja Protestan pada umumnya. Posisi Gembala Sidang di GIA hampir mirip dengan Gereja-gereja Pentakostal. Hanya saja sejak awal, kepemimpinan GIA tidak diberi nama. Baru setelah pendirinya meninggal pada tahun 1963, kepemimpinan GIA diberi nama menjadi Presbiterial Sinodal. Namun sebutan tersebut tidak dicantumkan dalam

Tata Gereja. Perubahan yang amat mendasar dari Pentakostal ke Presbiterial amat mengejutkan, bahkan menyebabkan GIA seolah-olah kehilangan jati diri. Sehingga, walaupun GIA tetap mempertahankan bentuk Presbiterial Sinodal namun pemahaman dan penghayatan pelaksanaannya tetap masih kabur. Dari istilah-istilah yang digunakan oleh Indrawan Eleas – “mengejutkan”, “ketimpangan disana sini,” “masih kabur,” “kontradiksi,” “kehilangan jati diri,” “benturan-benturan,” “kesulitan-kesulitan,” “tidak mampu menyatukan kedua macam wewenang” – memang nampak bahwa tidak mudah menerapkan pemerintahan bersama di suatu Gereja bercorak Pentakostal. Dalam kenyataan sehari-hari seolah-olah Gembala Jemaat dan Penatua/Diaken berada di kutub yang berbeda, padahal sebenarnya berada dalam kotak yang sama, yaitu lembaga kemajelisan. Maka di suatu persidangan sinode pada tahun 1976 tercetus untuk beralih ke sistem Kongregasional. Namun sidang tetap mempertahankan sistem Presbiterial Sinodal, sekalipun pemahaman dan penghayatan pelaksanaannya tetap masih kabur. Lalu pada Sidang Sinode XIX, tahun 2005 di Batu, Malang diputuskan untuk menambah istilah menjadi “Presbiterial Sinodel Khas GIA.” Arti dari “Khas

¹⁷ Tjoan, *Buku Peringatan Berdiri 10 Tahun Dari Geredja Isa Almasih (Sing Ling Kauw Hwee) Di Indonesia*, 50.

¹⁸ Eleas, *Gerak. Pentakosta Berkaitan Dengan Sej. Dan Teol. Gereja Isa Almasih*, 172-174.

GIA” ialah bahwa istilah Presbiterial Sinodal yang dipakai dalam sistem organisasi GIA tidak sama persis seperti sistem Presbiterial yang berlaku di Gereja-gereja Protestan. Semangat dan roh kepentakostaan nampak dalam peran dan fungsi seorang Gembala Jemaat menjadi Ketua Majelis, baik pada tingkat Lokal, Daerah dan Sinode.¹⁹ Dalam sistem seperti ini, kepemimpinan tidak berada dalam kekuasaan satu orang, namun bersifat musyawarah oleh sejumlah pemimpin yang dipilih Jemaat. Jadi, meskipun pemerintahan GIA bersifat jamak namun ia berbeda dengan pemerintahan Gereja-gereja Protestan pada umumnya, di mana Pendeta tidak lebih tinggi dibanding anggota Majelis lainnya. Majelis di GIA langsung diketuai oleh Gembala Jemaat, walaupun tidak secara otomatis memiliki wewenang mutlak seperti Gembala Sidang di Gereja-gereja Pentakosta pada umumnya.²⁰

Walau sudah dipertegas menjadi “Presbiterial Sinodal Khas GIA” namun pemahaman terhadap model pemerintahan GIA tetap saja tidak seragam. Dan jika dicermati dengan seksama dapat dikatakan bahwa dalam pemerintahan GIA terdapat tiga model pemerintahan Gereja, yaitu: model Presbiterial Sinodal, model Laikal, dan model Kepenatuaan. Model Presbiterial, ka-

rena ada lembaga Majelis; model Laikal, karena ada Gembala Sidang (Jemaat); model Kepenatuaan, karena posisi Gembala Jemaat yang sedikit lebih tinggi dibandingkan anggota Majelis lainnya, sebab dia otomatis menjadi Ketua.

Menurut Andar Ismail, dalam Gereja dengan bentuk Presbiterial pemerintahan dipegang oleh sebuah lembaga, yaitu Majelis, yang terdiri dari satu orang atau lebih Pendeta beserta sejumlah Pesbiter atau Penatua yang dipilih oleh Jemaat. Partisipasi jemaat dalam Gereja dengan pemerintahan model ini tampak dalam rapat Majelis yang diselenggarakan secara rutin, ataupun dalam rapat anggota Jemaat.²¹ Salah satu keistimewaan model pemerintahan Presbiterial Sinodal, menurut J.A. Telnoni, adalah bahwa para pejabat gerejawinya berada dalam satu persekutuan Presbiter. Mereka adalah satu barisan persekutuan pelayan-pelayan Tuhan yang bersama-sama terpanggil dan bertanggung jawab atas pelayanan gereja. Pimpinan pemerintahan Gereja adalah suatu persekutuan para pelayan. Tidak ada kepemimpinan tunggal di dalam organisasi Gereja. Para pejabat gerejawi yang menjalankan pemerintahan Kristus dalam Gereja-Nya terhimpun dalam satu persekutuan pelayan-pelayan dengan kedudukan sama. Se-

¹⁹ GIA, *Tata Gereja Sinode Gereja Isa Almasih*, 107.

²⁰ Eleas, *Gerakan Pentakosta Berkaitan Dengan Sejarah Dan Teologia Gereja Isa Almasih*.

²¹ Andar Ismail, *Awam & Pendeta Mitra Membina Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 175.

kalipun di dalam tata organisasi gereja, kedudukan struktural mereka berbeda, seorang ketua bukanlah kepala, melainkan dia hanyalah orang yang dituakan karena kualitas-kualitas tertentu di dalam pelayanan Gereja. Oleh karena itu, pejabat organisasi yang satu tidak lebih tinggi daripada yang lain. Kedudukan Pendeta tidak lebih tinggi dari Penatua dan kedudukan Penatua tidaklah lebih dari Diaken. Yang satu tidak mendahului yang lain dan yang satu tidak mengatasi yang lain. Mereka adalah sesama pelayan yang melayani dalam iklim sehati sepikir.²² Model Presbiterial Sinodal umumnya diterapkan oleh Gereja-gereja Protestan, terutama Gereja-gereja suku, misalnya, GPIB (Gereja Protestan Indonesia bagian Barat), GKI (Gereja Kristen Indonesia), GKT (Gereja Kristus Tuhan), dan sebagainya.²³

Dalam pemerintahan Laikal, pemerintahan Gereja dipegang oleh satu orang Pendeta. Kata laikal berasal dari kata *laikos* atau *laos*. Kemudian diterjemahkan menjadi *lay* dalam bahasa Inggris atau awam dalam bahasa Indonesia.²⁴ Kata *laos* adalah lawan kata *ethne*, yaitu orang/bangsa yang tidak mengenal Allah (Kis. 14:5). Kata *laos* juga digunakan sebagai lawan kata *kleros* (penguasa kekaisaran). Dari istilah itu ke-

mudian muncul kata *cleric*, yaitu administrator negeri dan *clergy*, yaitu rohaniwan. *Laos* berarti rakyat biasa yang tidak mengetahui peraturan pemerintah dan tidak mempunyai kuasa, dan dianggap bisa dibodohi oleh para *kleros*. Walaupun peran awam disebutkan menonjol, namun bentuk pemerintahan yang ditemukan dalam kebanyakan gereja independen (berdiri sendiri) adalah pemerintahan oleh satu orang. Ciri-ciri model pemerintahan Laikal adalah: pertama, pimpinan (pemerintah) Gereja sepenuhnya berada di tangan seorang Pendeta. Segala sesuatu menyangkut kegiatan Gereja, mulai dari ide-ide awal, perencanaan, dan pelaksanaan adalah urusan Pendeta; anggota Jemaat tidak berhak mencampurinya. Ia yang membuat semua keputusan; ia sendiri yang menentukan sasaran-sasaran dan para warga jemaat didorong untuk menerima kuasa otokrasinya; ia adalah sumber antusiasme, ide-ide baru dan program-program; kedua, Pendeta dapat membentuk Majelis Jemaat, namun hanya jika dirasa perlu. Fungsi utama Majelis di Gereja hanyalah membantu Pendeta; ketiga, peran kaum awam dalam kepemimpinan agak minim, sedangkan peran Pendeta berada jauh di atas orang awam; keempat, dalam ibadah Minggu, peran Pendeta jauh lebih besar di-

²² J. A. Teloni, *Gereja Berasaskan Presbiterial Sinodal* (Kupang, NTT: CV. INARA, 2011).

²³ Walter Mohr, *Anda Dan Gereja*, ed. Cahya R (Surabaya: Yakin, n.d.).

²⁴ Ismail, *Awam & Pendeta Mitra Membina Gereja*.

banding peran kaum awam; kelima, tradisi, hierarki dan organisasi dianggap kurang baik, sebaliknya, yang dianggap baik bagi kehidupan gereja adalah gaya spontan, impulsif, dan cenderung improvisasi; keenam, dalam ibadah Minggu tidak ada tata ibadah (liturgi) yang baku, sehingga orang-orang awam bisa lebih partisipatif dan kontributif.²⁵ Model pemerintahan Laikal umumnya ditemukan di Gereja-gereja Pentakostal.

Dalam model pemerintahan Kepenatuaan, pemerintahan Gereja dijalankan oleh sebuah tim Penatua. Walaupun disebut Penatua, namun berbeda dengan Penatua dalam Gereja-gereja Protestan. Dalam pemerintahan ini, tim bukanlah terdiri dari sejumlah kaum awam, melainkan beberapa orang rohaniwan yang disebut sebagai Presbiter. Kepenatuaan bukan pula merupakan sebuah lembaga kemajelisan. Di sini berbagai hamba Tuhan (Penatua-penatua Rohani) bekerja dalam menggembalakan warga jemaat di gereja lokal. Bersama-sama, sebagai sebuah tim, mereka melayani orang-orang yang telah Allah tetapkan ke dalam gereja lokal. Maka bentuk ini dapat diberi istilah pelayanan tim.²⁶ Mereka disebut sebagai “badan para penatua” atau “kepemimpinan pastoral yang terbagi” atau “pemerintahan pastoral bersama-sama.”²⁷ Meskipun

para penatua itu bekerja secara bersama-sama dan memikul tanggung jawab yang sama dalam melaksanakan tugas kepenilikan jemaat, namun mereka semua tidaklah sama dalam karunia-karunia, pengetahuan, kemampuan untuk memimpin, ataupun dedikasi yang mereka miliki. Di antara para Penatua tersebut pasti terdapat satu orang yang dipandang sebagai orang terkemuka. Dia menjadi yang utama dari yang sejajar di antara orang-orang lainnya yang sederajat kedudukannya. Inilah yang oleh orang-orang Roma disebut sebagai *primus inter pares* (yang utama dari yang sejajar atau *the first among equal*).²⁸ Dia akan berdiri sebagai motivator atau pemimpin diantara para penatua lainnya. Namun yang disebut “yang utama” dalam pemerintahan kepenatuaan juga bukanlah Gembala Jemaat. Di Indonesia, model pemerintahan kepenatuaan (tim) dapat ditemukan misalnya di Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB); juga di Gereja Injil Seutuh Indonesia (GISI)/Indonesian Full Gospel Fellowship (IFGF); dan di Abba Love.

Memerhatikan keragaman pemahaman di kalangan rohaniawan GIA, maka penelitian ini bermaksud untuk mengukur tingkat pemahaman rohaniwan Sinode GIA terkait model pemerintahan Presbiterian Si-

²⁵ Ismail.

²⁶ Dick Iverson and Ray Grant, *Pelayanan Tim* (Jakarta: Harvest Publication House, 1993).

²⁷ Alexander Strauch, *Mana Yang Lebih Alkitabiah Kepenatuaan Atau Kependetaan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1992).

²⁸ Strauch.

nodal, model pemerintahan Laikal, dan model pemerintahan Kepenatuaan. Pemahaman-pemahaman tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi ketertiban berorganisasi dalam GIA.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif eksploratif, dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah para rohaniwan Sinode GIA, sebanyak 357 orang,²⁹ yang tersebar di 146 Jemaat, di sembilan daerah di beberapa provinsi di Indonesia. Pengambilan sampel memakai teknik sampling jenuh atau sampling sensus. Sampel dalam penelitian ini adalah para rohaniwan GIA yang ada di Jemaat-jemaat Daerah I – IV, berjumlah 193 orang (54,5% dari keseluruhan rohaniwan yang ada di Sinode GIA). Jemaat-jemaat Daerah I (Semarang Barat, Kendal, Boja, Weleri, dan sekitarnya); Jemaat-jemaat Daerah II (Semarang Timur, Ungaran, Bawen, Ambarawa, dan sekitarnya); Jemaat-jemaat Daerah III (Purwodadi, Kudus, Pati, Juwana dan sekitarnya); Jemaat-jemaat Daerah IV (Salatiga, eks Karesidenan Surakarta, Jawa Tengah Bagian Selatan dan sekitarnya). Kuesioner yang disebarakan adalah sebanyak 193. Sedangkan kuesioner yang kembali adalah se-

banyak 103, dan yang dimasukkan dalam tabulasi adalah sebanyak 100 responden.

Variabel independen dalam penelitian ini ada tiga, yaitu: model pemerintahan Presbiterial Sinodal (X_1), model pemerintahan Laikal (X_2), model pemerintahan Kepenatuaan (X_3). Sedangkan, variabel dependen (Y) adalah ketertiban para rohaniwan GIA. Instrumen penelitian ini memakai kuesioner tertutup. Untuk setiap variabel dibuat skala penilaian dengan rentang jawaban 1 sampai 4. Indikator dikembangkan berdasarkan lima dimensi, yaitu: dimensi otoritas tertinggi di Sinode, dimensi otoritas tertinggi di Jemaat, dimensi kedudukan dan wewenang Pendeta dan Majelis, dan dimensi manajemen Gereja. Kelima dimensi ini kemudian dikembangkan menjadi item pernyataan. Pernyataan untuk variabel model pemerintahan Presbiterial Sinodal (X_1) terdiri dari 17 item; variable pemerintahan Laikal (X_2) terdiri dari 18 item; variable pemerintahan Kepenatuaan (X_3) terdiri dari 14 item, dan variable ketertiban (Y) terdiri dari 16 item. Setiap item memiliki empat jawaban alternatif yaitu: untuk jawaban STS = sangat tidak setuju, diberikan skor 1; untuk jawaban TS = tidak setuju, diberikan skor 2; untuk jawaban S = setuju, diberikan skor 3; dan untuk jawaban SS = sangat setuju, diberikan skor 4. Kisi-kisi instrumen dibuat

²⁹ MPH Sinode GIA, *Buku Direktori* (Semarang, n.d.).

berdasarkan indikator-indikator yang sudah ditentukan.

Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner terhadap para rohaniwan Sinode GIA yang ada di Daerah I – IV. Kemudian, data sekunder internal diperoleh dari buku-buku, literatur, dokumen, atau arsip yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti buku Tata Gereja Isa Almasih, dan dokumen-dokumen yang ada di kantor Sinode Gereja Isa Almasih, seperti hasil Convent Pendeta, bahan Sidang Sinode, dan sebagainya. Data sekunder eksternal diperoleh dari luar Sinode GIA, yaitu berupa publikasi, internet dan data lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner (angket) berupa pernyataan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil Uji Linearitas

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai Dev. Linearity tabel ANOVA (hubungan yang linear) pada model pemerintahan Presbiterial Sinodal (X_1) adalah sebesar 0,251. Itu berarti nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,251 > 0,05$). Maka, dapat disimpulkan bahwa model pemerintahan Presbiterial Sinodal (X_1) berpola linier terhadap ketertiban GIA (Y). Kemudian nilai Dev. Linearity tabel ANOVA (hubungan yang linear) pada model pemerintahan Laikal (X_2) adalah sebesar 0,348. Itu berarti nilai signi-

fikan lebih besar dari 0,05 ($0,348 > 0,05$). Maka, dapat disimpulkan bahwa model pemerintahan Laikal (X_2) berpola linier terhadap ketertiban GIA (Y). Selanjutnya nilai Dev. Linearity tabel ANOVA (hubungan yang linear) pada model pemerintahan Kepenatuaan (X_3) adalah sebesar 0,155. Itu berarti nilai signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,155 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa model pemerintahan Kepenatuaan (X_3) berpola linier terhadap ketertiban GIA (Y).

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mencari atau meramalkan dua variabel prediktor atau lebih terhadap variabel kriteriumnya. Model regresi linear berganda dilukiskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_n X_n + e$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat atau response.

X = Variabel bebas atau predictor.

α = Konstanta.

β = Slope atau Koefisien estimate

Asumsi atau prasyarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu, yaitu: uji koefisiensi determinasi (uji R), uji F (pengaruh simultan), dan uji t (pengaruh parsial). Uji koefisiensi determinasi bertujuan untuk mengetahui berapa persen pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y); sedangkan uji t (uji parsial) bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh

parsial (sendiri-sendiri) variable bebas (X) terhadap variabel terikat (Y); dan uji F (uji simultan) bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) variable bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel “Model Summary” dapat disimpulkan bahwa model pemerintahan Presbiterial Sinodal, model pemerintahan Laikal, dan model pemerintahan Kepenatuaan berpengaruh sebesar 0,422 (42,2%) terhadap terhadap ketertiban di GIA, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang tidak diteliti (variabel pengganggu). Dan karena nilai R Square dibawah 5% atau cenderung mendekati nilai 0 maka dapat disimpulkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variable adalah berkorelasi cukup.

Hasil Uji t (Uji Parsial)

Hasil uji t nampak bahwa pada model pemerintahan Presbiterial Sinodal (X₁) terdapat nilai sig 0,007. Itu berarti nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 (0,007 < 0,05). Maka, H₁ diterima dan H₀ ditolak. Variabel X₁ mempunyai t_{hitung} - 0,215 dengan t_{tabel} = 0,270 (-27 %). Jadi t_{hitung}>t_{tabel}, dapat disimpulkan bahwa variabel X₁ memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X₁ mempunyai hubungan yang tidak searah

dengan Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pemerintahan Presbiterial Sinodal (X₁) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Beta.

Nampak pula pada kolom *Coefficients* bahwa pada model pemerintahan Laikal (X₂) terdapat nilai sig 0,000. Itu berarti nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 (0,000 < 0,05). Maka, H₁ diterima dan H₀ ditolak. Variabel X₂ mempunyai t_{hitung} 0,380 dengan t_{tabel} = 0,30 (38%). Jadi t_{hitung}>t_{tabel}, dapat disimpulkan bahwa variabel X₂ memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X₂ mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pemerintahan Laikal (X₂) memiliki pengaruh signifikan terhadap Beta.

Sedangkan pada model pemerintahan Kepenatuaan (X₃) terdapat nilai sig 0,000. Itu berarti nilai sig lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 (0,000 < 0,05). Maka, H₁ diterima dan H₀ ditolak. Variabel X₂ mempunyai t_{hitung} 0,347, dengan t_{tabel} = 0,354 (35,4%). Jadi t_{hitung}>t_{tabel}, dapat disimpulkan bahwa variabel X₂ memiliki kontribusi terhadap Y. Nilai t positif menunjukkan bahwa variabel X₂ mempunyai hubungan yang searah dengan Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pemerintahan Kepenatuaan (X₃) memiliki pengaruh signifikan terhadap Beta.

Hasil Uji F (Uji Simultan)

Dari tabel diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 23,399 dengan nilai probabilitas (sig) = 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka H_{01} diterima, berarti secara bersama-sama (simultan) variabel model pemerintahan Presbiterial Sinodal, model pemerintahan Laikal, dan model pemerintahan Kepenatuaan berpengaruh signifikan terhadap ketertiban di GIA.

Pembahasan

Dari hasil penelitian terungkap bahwa tingkat pemahaman para rohaniwan Sinode GIA tentang model pemerintahan Presbiterial Sinodal adalah negatif. Sebab nilai sig model pemerintahan Presbiterial Sinodal (X_1) adalah sebesar 0,007, berarti lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ($0,007 < 0,05$); t_{hitung} adalah sebesar -0,215, dan t_{tabel} adalah 0,270 (-27 %). Sedangkan tingkat pemahaman para rohaniwan Sinode GIA tentang model pemerintahan Laikal adalah positif sebab nilai Sig. model pemerintahan Laikal (X_2) adalah sebesar 0,000, lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 ($0,000 > 0,05$); nilai t_{hitung} adalah sebesar 0,380, dan nilai t_{tabel} adalah sebesar 0,380 (38 %). Kemudian tingkat pemahaman para rohaniwan Sinode GIA tentang model pe-

merintahan Kepenatuaan juga bersifat positif sebab nilai sig model pemerintahan Kepenatuaan (X_3) adalah sebesar 0,000, yang berarti lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 ($0,000 > 0,05$); t_{hitung} adalah sebesar 0,347, dan t_{tabel} adalah sebesar 0,354 (35,4 %). Nampak bahwa tingkat pemahaman rohaniwan GIA tentang model pemerintahan Presbiterial Sinodal menempati posisi paling rendah, bahkan minus. Yang paling tinggi justru pemahaman tentang model pemerintahan Laikal, disusul model pemerintahan Kepenatuaan. Maka, dapat diduga bahwa terjadinya ketidaktertiban berupa ketegangan-ketegangan dan gesekan-gesekan antara rohaniwan dan awam di lingkup Sinode GIA disebabkan oleh tingkat pemahaman yang rendah terhadap model pemerintahan gereja.

Pemahaman para rohaniwan GIA tentang model pemerintahan memang tidak seragam. Hal itu nampak dari pandangan-pandangan yang ada. Minggu Minarto, misalnya, menyebut bahwa corak bergereja dan corak kepemimpinan GIA itu sama dengan corak arus utama pada umumnya. Jadi, secara sistem organisasi berbeda dari gereja-gereja Pantekostal pada umumnya.³⁰ Sedangkan Hendarto Supatra menyebut bahwa GIA itu berinduk atau bernaung di ba-

³⁰ Minggu Minarto Pranoto, "Perempuan Pemimpin di Gereja Isa Almasih: Tinjauan dari Perspektif Teologi Feminis dan Renewal Theology," *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan*

Agama Kristen Dan Musik Gereja 2, no. 2 (October 29, 2018): 15–31, <https://doi.org/10.37368/JA.V2I2.29>.

wah GPDI. Disebutkan oleh Supatra, “Konon diduga Gereja Isa Almasih (GIA) yang didirikan oleh Tan Hok Tjoan itu juga berasal dari semacam persekutuan doa yang berinduk atau bernaung di bawah GPDI Jalan Karang Sari Semarang.”³¹ Kemudian Feby Sherentya menyebut aliran Gereja Isa Almasih itu adalah Pantekosta Presbiterial.³² Sedangkan menurut Widhi Laksana dan Heryanto, model kepemimpinan ini (Presbiterial Sinodal) memiliki ciri kepemimpinan Gereja dipimpin oleh Majelis dengan pemimpin Majelis adalah Gembala Jemaat. Dengan demikian, pengambilan keputusan tertinggi terletak di tangan Gembala Jemaat. Salah satu contoh gereja yang menggunakan model kepemimpinan ini ialah Gereja Isa Almasih, di mana Gembala Jemaat menjadi ketua dalam sistem kepemimpinan GIA, baik dalam kemajelis tingkat GIA Jemaat Lokal maupun dalam kemajelis tingkat GIA Jemaat-jemaat Daerah maupun tingkat Sinode.³³

Hal itu perlu lebih dipertegas, sebab seperti diungkapkan oleh Borrong, rohaniawan membutuhkan peraturan dan kode etik. Peraturan mengenai Pendeta berkaitan dengan norma hukum yang berlaku untuk seorang Pendeta; kode etik Pendeta lebih ber-

fungsi sebagai pedoman moral dalam menjalankan kehidupan seorang pendeta dan khususnya menolong pendeta mengoptimalkan fungsinya.³⁴ Dalam kehidupan masyarakat yang lebih tertata, tentu memiliki mekanisme dan alat yang mampu untuk mengontrol perilaku dan ketaatan anggota masyarakat sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.³⁵

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa, walaupun GIA sejak lama menyebut dirinya sebagai Gereja dengan pemerintahan Presbiterial Sinodal, tingkat pemahaman para rohaniawan GIA tentang model pemerintahan Presbiterial Sinodal ternyata sangat rendah, bahkan minus. Yang lebih dipahami dan dihayati justru model pemerintahan Laikal dan model pemerintahan Kepenatuaan. Gembala Jemaat/Pendeta (rohaniawan) dianggap sebagai Ketua Majelis sehingga posisinya berada di atas Majelis (awam). Majelis hanya berposisi sebagai pembantu Gembala Jemaat. Ini perlu diseimbangkan, sehingga terjadi ketertiban. Bukan dengan memosisikan kaum awam lebih tinggi atau

³¹ Hendarto Supatra, “Mengenal Pentakostalisme di Indonesia,” *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 3, no. 2 (November 22, 2019): 11–24, <https://doi.org/10.37368/JA.V3I2.97>.

³² Feby Sherentya, “Gereja Isa Almasih Di Semarang” (Universitas Katolik Soegijapranata, 2018), 61–62.

³³ Widhi Laksana dan Heryanto, “Kesekretariatan Menunjang Perubahan Kepemimpinan Dalam Gereja,” n.d.

³⁴ Robert P. Borrong, “Signifikansi Kode Etik Pendeta,” *Gema Teologi* 39, no. 1 (2015): 73–96.

³⁵ Suryadi Suryadi, “Fungsi Hukum Sebagai Alat Dan Cermin Perubahan Masyarakat,” *Jurnal Rural and Development* 1, no. 2 (2010): 169–76.

menurunkan posisi rohaniwan menjadi lebih rendah. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi antara rohaniwan dan awam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Prof. Dr. S. Pantja Djati selaku Promotor dan kepada Dr. Eddy Simanuntak selaku co-Promotor yang membimbing penulis dalam penelitian dan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Borrong, Robert P. "Signifikansi Kode Etik Pendeta." *Gema Teologi* 39, no. 1 (2015): 73–96.
- Darmaputera, Eka. "Kepemimpinan: Perspektif Alkitab." In *Kepemimpinan Kristiani: Spiritualitas, Etika, Dan Teknik-Teknik Kepemimpinan Dalam Era Penuh Perubahan*, edited by Eka Darmaputera. Jakarta: Unit Publikasi & Informasi Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, 2003.
- Eleeas, Indrawan. *Gerakan Pentakosta Berkaitan Dengan Sejarah Dan Teologia Gereja Isa Almasih*. Semarang: GIA Pringgading, 2008.
- Esterina, Dina. "Gereja Sebagai Organisasi Yang Khas." *dinaesterinastories.blogspot.com*, 2015.
- GIA, MPH Sinode. *Tata Gereja Sinode Gereja Isa Almasih*. Semarang: MPH Sinode GIA, 2008.
- Gunawan, Ronny. "Benarkah Gereja Isa Almasih Menganut Sistem Organisasi Presbyterial Sinodal?" Semarang, 2001.
- Guthrie, Donald. *Teologia Perjanjian Baru*. Jilid 3. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993.
- Hadiwijono, Harun. *Iman Kristen*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007.
- Heryanto, Widhi Laksana dan. "Kesekretariatan Menunjang Perubahan Kepemimpinan Dalam Gereja," n.d.
- Ismail, Andar. *Awam & Pendeta Mitra Membina Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.
- Iverson, Dick, and Ray Grant. *Pelayanan Tim*. Jakarta: Harvest Publication House, 1993.
- Koliludin, Tedy. "Semarang Ibu Kota Gereja Isa Almasih." *elsaonline.com*, n.d.
- Mangolo, Yonathan, and Osinus Sagala. "Disiplin Gereja." *KINAA: Jurnal Teologi* 4, no. 2 (December 30, 2019): 51–64. <https://doi.org/10.0302/KINAA.V4I2.1031>.
- Mohr, Walter. *Anda Dan Gereja*. Edited by Cahya R. Surabaya: Yakin, n.d.
- MPH Sinode GIA. *Buku Direktori*. Semarang, n.d.
- Pranoto, Minggus Minarto. "Perempuan Pemimpin di Gereja Isa Almasih: Tinjauan dari Perspektif Teologi Feminis dan Renewal Theology." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 2, no. 2 (October 29, 2018): 15–31. <https://doi.org/10.37368/JA.V2I2.29>.
- Sherentya, Feby. "Gereja Isa Almasih Di Semarang." Universitas Katolik Soegijapranata, 2018.

- Soleiman, Yusak. "Tradisi Teologis Calvinis Di Indonesia - Sebuah Pendekatan Sejarah Sosial." *Academia*, 2009.
- Strauch, Alexander. *Mana Yang Lebih Alkitabiah Kepenatuaan Atau Kependetaan*. Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- Supatra, Hendarto. "Kajian Sinkronik 10 Tahun Gereja Isa Almasih Sebagaimana Tercermin Pada "Dokumen Peringatan 10 Tahun Geredja Isa Almasih"." STT Abdiel, Ungaran, 2002.
- . "Mengenal Pentakostalisme di Indonesia." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 3, no. 2 (November 22, 2019): 11–24. <https://doi.org/10.37368/JA.V3I2.97>.
- Suryadi, Suryadi. "Fungsi Hukum Sebagai Alat Dan Cermin Perubahan Masyarakat." *Jurnal Rural and Development* 1, no. 2 (2010): 169–76.
- Telnoni, J. A. *Gereja Berasaskan Presbiterial Sinodal*. Kupang, NTT: CV. INARA, 2011.
- Tjoan, Tan Hok. *Buku Peringatan Berdiri 10 Tahun Dari Geredja Isa Almasih (Sing Ling Kaw Hwee) Di Indonesia*. Semarang, 1956.
- Waworuntu, Tony. "Tatanan Untuk Ketertiban Hidup." gpibgetsemani.blogspot.com. Balikpapan, n.d.